Masyarakat, kebida jaan dan Politik

Daftar Isi

Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada Syarif Hidayat	169–180
Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009 Ari Pradhanawati	181–186
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Achmad Habibullah	187–195
Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan Edy Wahyudi	196–205
Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara R. Hamdani Harahap	206–212
Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues Slamet Rosyadi	213–220
Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruk Subjek Transgender di Media Indonesia Rachmah Ida	221–228
Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa Sarkawi B. Husain dan Sri Endah Kinasih	229–235
Wacana Dominan dalam Teks <i>Awig-awig</i> I.B. Putera Manuaba	236–243
Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi Fendy E. Wahyudi	244–255

Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi

Fendy E. Wahyudi¹

Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga Program Peminatan Globalisasi dan Strategi

Abstract

The number of democratic states had increased recently. At least, from 1974 to 1990 more than thirty countries were in transition towards democracy. This paper aimed to explain the relationship between demographic variables with the variables of democracy. This research used the comparative method using quantitative analysis to answer how far the influence of fertility level for the democracy in a country. This research used the merging of two theories, ie. demographic transition theory that involved the influence of economic conditions on democracy. This research used the concept of polyarchy democracy. Vanhanen Democracy Index and the Freedom House Index were used as indicators of Polyarchy Democracy tested by Demographic Indicators. Total Fertility Rate (TFR) was used as an indicator of the total fertility rate in the country's population. The results of this study proved that the higher the fertility level of a country's total population, the lower the level of its democracy.

Key words: demography, poliarchy, TFR, Vanhanen Democracy Index, Freedom House Index

Pertumbuhan negara penganut demokrasi dari tahun ke tahun kian menunjukkan peningkatan. Setidaknya antara tahun 1974 hingga 1990 lebih dari tiga puluh negara mengalami transisi menuju demokrasi. Transisi berlangsung di kawasan Eropa Selatan, kemudian berlanjut ke Amerika Latin dan Amerika Tengah, dan berikutnya menyebar di Eropa Timur, Afrika, dan berujung pada demokratisasi di Asia (Sorensen 1993:52). Berakhirnya Perang Dingin ternyata justru ikut meningkatkan transisi bahkan transformasi negara-negara di dunia menjadi negara yang demokratis. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena demokrasi gelombang ke empat (McFaul 2006).

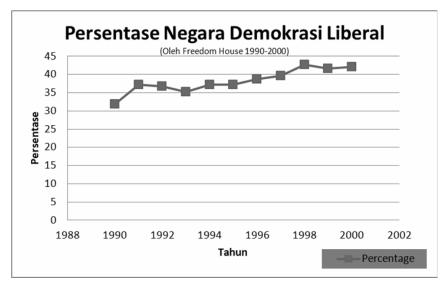
Berdasarkan data indeks demokrasi yang dirilis oleh *freedom house* Sejak tahun 1990 hingga tahun 2008 (Bagan 1), terjadi peningkatan sebanyak 39% terhadap jumlah negara-negara yang terkategorikan demokrasi liberal. Dengan kata lain terjadi peningkatan yang cukup besar negaranegara yang menganut demokrasi berdasarkan penilaian demokrasi subtantif. Hal ini belum lagi jika penilaian demokrasi tidak hanya diberikan pada negara yang telah mengadopsi demokrasi liberal, namun juga mengikut sertakan negara-negara

penganut demokrasi prosedural, kondisi ini tentu akan semakin memperbesar jumlah negara yang menganut demokrasi.

Fenomena menjamurnya demokrasi ini atau menggunakan istilah Georg Sorensen (1993) "musim semi demokrasi" melahirkan sejumlah daya tarik tersendiri terutama dari kalangan akademisi untuk memepelajari fenomena demokratisasi tersebut. Terdapat banyak kajian tentang demokrasi mulai dari proses demokratiasasi, hingga kaitan antara demokrasi dan faktor-faktor eksogen (di luar) demokrasi. Sejumlah peneliti bahkan telah banyak merintis dan membangun kajian bertemakan demokrasi dan ekonomi (Lipset 1959; Sorensen 1993; Barro 1994; Przeworski dkk. 2000; Acemoglu & Johson dkk. 2005).

Salah satu faktor eksogen lainnya yang layak untuk diteliti adalah faktor demografi atau kependudukan. Data yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2008 menunjukkan kesepuluh negara ranking tertinggi demokrasi di dunia memeiliki angka *total fertility rate* dibawah 2. Implikasinya adalah negaranegara ini memiliki kecenderungan komposisi penduduk usia lanjut.

¹ Korespondensi: Fendy E. Wahyudi. Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga. Jl. Airlangga 4–6 Surabaya 60286, Indonesia. Phone: (031) 5011744. E-mail: fewahyudi@yahoo.com



Bagan 1.
Persentase negara yang beranking free dalam freedom house Index 1990–2000

Sejumlah kajian seputar demokrasi dan faktorfaktor eksogen demokrasi terutama komposisi demografi juga mulai menjadi tradisi yang menarik untuk dibahas. Sejumlah penelitian mulai mengaitkan hubungan demografi dalam hal ini tingkat fertilitas total (total fertility rate) dengan tingkat demokrasi suatu negara (lihat dalam Adam Przeworski dkk 2000, Siroky & Siroky 2005). Namun dari sejumlah penelitian terkait demokrasi dan demografi yang pernah ada, masih sulit dijumpai kajian generalisasi deskriptif yang mampu menjelaskan pengaruh faktor demografi khususnya tingkat fertilitas dalam sebuah negara terhadap pelaksanaan demokrasi dalam negara tersebut. Oleh karena itu perlu dibahas sejauh mana bentuk pengaruh faktor demografi dalam hal ini tingkat fertilitas total penduduk (total fertility rate) terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara.

Jawaban atas rumusan masalah di atas dapat ditemukan dengan membangun sebuah kerangka kerja teoritis yang dibangun dari teori-teori demografi dan demokrasi dengan menggunakan variabel ekonomi sebagai batu loncatan. Berangkat dari teori transisi demografi yang dikemukakan oleh (Notestein dkk 1944), penjelasan dari efek tingkat fertilitas terhadap kondisi ekonomi dibangun. Melalui tesis Lipset tentang pengaruh kondisi ekonomi tertentu terhadap demokrasi (Lipset 1959), maka jembatan teoritis pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi dapat dibangun.

Penggunaan kerangka kerja teoritis di atas dikaitkan dengan indikator tingkat fertiltas dalam hal ini *total fertility rate (TFR)* serta indikator demokrasi

poliarki dalam hal ini menggunakan *freedom house index* dan *vanhanen index* maka hubungan kausalitas tingkat fertilitas dengan tingkat demokrasi dapat dijelaskan. Dalam tulisan ini diangkat satu tesis bahwa semakin tinggi tingkat fertilitas total penduduk sebuah negara maka negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang lebih rendah ketimbang negara dengan tingkat fertiltas total yang lebih rendah.

Model dan Variabel

Penelitian terkait demokrasi khususnya proses demokratisasi tidak terlepas dari rentang waktu kapan study tersebut dilaksanakan. Fenomena demokratisasi di era tahun 1970-an atau yang lebih dikenal sebagai demokrasi gelomabang ke tiga tentu akan memiliki model demokratisasi yang berbeda (Huntington 1991).

Pasca-runtuhnya lokomotif komunisme yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet tahun 1991 sebanyak 28 negara baru bekas Soviet telah meninggalkan komunisme dan beralih ke demokrasi. Fenomena demokratisasi ini yang disebut oleh Michael McFaul (2002) sebagai demokrasi gelombang ke empat.

Keberadaan demokrasi gelombang keempat hingga saat ini masih dipandang relevan untuk menjelaskan fenomena demokrasi yang terjadi pasca komunisme. Oleh karenanya demokrasi gelombang keempat dapat digunakan sebagai batasan ruang lingkup penelitian yakni berawal dari kemunculan demokrasi gelombang keempat atau pasca runtuhnya komunisme.

Penggunaan konsep demokrasi gelombang keempat tersebut menghasilkan populasi data dan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini hendak mengetahui pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi maka populasi dalam penelitian ini adalah negara merdeka di era demokrasi gelombang keempat. Dengan kata lain populasi penelitian adalah seluruh negara dunia yang merdeka dalam interval tahun 1991–2000. Berikutnya dilakukan pengambilan sampel negara berdasarkan tiga kategorisasi. Negara yang memenuhi ketiga kategorisasi tersebut maka dapat dimasukan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Kategorisasi pertama negara tersebut haruslah negara yang merdeka dalam kurun waktu tahun 1991 hingga tahun 2000. Pemilihan interval waktu ini didasarkan pada tinjauan demokrasi gelombang keempat.

Kategorisasi kedua, negara tersebut merupakan negara berpopulasi minimal 100.000 jiwa. Hal ini dilakukan sebagai prasyarat agar analisis yang dilakukan tidak banyak terpengaruhi oleh data negaranegara berpenduduk kecil. Perlu diingat bahwa konsep demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah demokrasi poliarki atau demokrasi yang dilaksanakan dalam tatanan sebuah negara, sehingga data negara-negara berpenduduk kurang dari 100.000 dikhawatirkan dapat menimbulkan bias dalam analisi data.

Kategorisasi ketiga, negara tersebut memnuhi prasyarat *treshold* dua indikator poliarki yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain negara tersebut memenuhi prasyarat dalam indeks vanhanen yakni menggelar pemilihan umum, serta tergolong negara demokratis dalam *freedom house index* (FHI). Dalam pemilihan negara demokratis pada FHI yang disebut demokratis dalam penelitian ini adalah negara dengan kategori minimal *parthly free* (PF). Negara dengan kategori *not free* (NF) tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan analisis statistik ini hendak menguji pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi.

Dari ketiga kategorisasi tersebut maka didaptkan sampel sebanyak 141 negara dari total populasi penelitian seluruh negara di dunia. Seluruh negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini kemudian dianalisis tingkat demografi dan demokrasinya.

Variabel Dependen

Pencaraian pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat demokrasi artinya menjadikan tingkat demokrasi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan konsep demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep demokrasi poliarki. Demokrasi poliarki sendiri merupakan konsep yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl (1971) mengenai demokrasi yang ada dalam tatanan masyarakat moderen. Dahl (2001: 115) menyebut praktik demokrasi yang kini ada di berbagai dunia adalah demokrasi skala besar dalam bentuk negara, bukan demokrasi yang berada "di awang-awang" atau sekadar nilai.

Dengan pendekatan Dahl tersebut maka pengukuran tigkat demokrasi suatu negara dapat dilakukan dengan memperhatikan lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh "demokrasi skala besar" tersebut, yakni: para pejabat yang terpilih, pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, kebebasan berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, hak kewarganegaraan yang inklusif (Dahl 2001:118).

Konsep demokrasi poliarki yang dikemukakan oleh Robert Dahl di atas mencerminkan praktik demokrasi skala besar, bukan demokrasi dalam tataran nilai ideal. Sehingga praktik demokrasi yang ada saat ini dan diterapkan di berbagai negara yang disebut demokratis di dunia lebih tepat ketika dilihat dari sudut pandang konsep demokrasi poliarki ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini konsep demokrasi yang digunakan adalah konsep demokrasi poliarki.

Indikator Demokrasi Poliarki

Setelah dibangun konsep demokrasi yang digunakan berikutnya dibutuhkan penurunan ke dalam variabel dan indikator terkait konsep demokrasi yang digunakan. Dari penjelasan terkait konsep demokrasi poliarki yang mensyaratkan terdapatnya enam lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar di atas berikutnya dapat diturunkan dalam variabel-variabel dan indikator demokrasi poliarki. Penurunan ke dalam variabel ini perlu dilakukan untuk memberikan pengukuran terhadap tingkat pelaksanaan demokrasi di setiap negara yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dari keenam lembaga politik poliarki di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, lembaga politik yang mencerminkan demokrasi prosedural, yakni: para pejabat yang terpilih, serta pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala. Kedua, lembaga politik yang mencerminkan demokrasi subtatntif, yakni: kebebasan berpendapat,

sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, hak kewarganegaraan yang inklusif.

Berangkat dari keenam lembaga politik demokrasi skala besar tersebut di atas maka telah terdapat sejumlah penelitian yang berusah mengukur tingkat poliarki suatu negara. Salah satu studi mengenai pengukuran poliarki ini dilakukan oleh Tatu Vanhanen (1984), yang kemudian mengeluarkan laporan yang sering disebut sebagai "indeks demokrasi vanhanen". Oleh karenanya untuk mengukur tingkat demokrasi poliarki dapat digunakan Indeks demokrasi vanhanen tersebut.

Berdasarkan pemikiran Dahl tersebut kemudian Vanhanen mengukur skor setiap negara ke dalam dua variabel yakni kompetisi dan partisipasi. Selain itu Vanhenan juga mengukur satu variabel yang disebut sebagai *index of democratization* (ID) yang merupakan gabungan antara variabel kompetisi dan partisipasi. Perolehan ID ini didapat dari pembagian per seratus hasil perkalian antara tingkat kompetisi dan partisipasi demokrasi suatu negara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan (1.1) di bawah ini.

$$ID = \frac{\text{(competition} \times \text{participation)}}{100} \dots \dots \dots \dots (1.1)$$

di mana: ID = indeks demokrasi

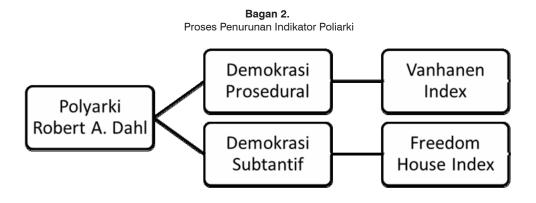
Indeks Vanhanen di atas dapat digunakan sebagai indikator pengukuran variabel demokrasi poliarki yang digunakan dalam penilitian ini. Pemahaman terhadap indeks vanhanen memberikan gambaran dalam penilitian ini untuk mengukur tingkat demokrasi secara prosedural atau mengukur dua lembaga politik poliarki yakni para pejabat yang

terpilih, serta pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala. Oleh karenanya butuh pengukuran lebih ditail mengenai lembaga politik poliarki yang lain yakni indeks demokrasi yang mampu mengukur demokrasi subtantif.

Salah satu indeks demokrasi yang mengukur tingkat demokrasi subtantif adalah *freedom house index*. Indeks demokrasi ini dikeluarkan oleh organisasi nonpartisan bernama dewan kebebasan. Dalam laporan tahunannya yang berjudul *freedom in the world*, dewan kebebasan mengukur tingkat demokrasi negara-negara di dunia. Kategori demokratis tidaknya suatu negara ditentukan dari tingkat kebebasan di negara tersebut; apakah negara tersebut memberikan hak-hak politik serta kebebasan sipil pada warganya.

Freedom house index sendiri isinya berupa pengkategorian negara ke dalam free (F), partly free (PF), dan not free (NF). Pengkategorian tersebut berdasarkan 7 subkategori yakni: electoral process, political pluralism and participation, functioning of government, freedom of expression and belief, associational and organizational rights, serta personal autonomy and individual rights. Dari ketujuh subkategori tersebut digolongkan ke dalam dua kategori besar yakni civil liberty (CL) dan political right (PR) (Freedomhouse.org 2008). Dengan kata lain pengukuran demokrasi subtatntif dapat dilakukan dengan menggunakan freedom house index.

Pemilihan indeks demokrasi vanhanen dan indeks demokrasi freedom house dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator pengukur variabel demokrasi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Pemilihan indeks vanhanen dan freedom house dinilai telah cukup merepresentasikan pengukuran tingkat demokrasi berdasrkan konsep demokrasi poliarki yang digunakan dalam penlitian ini.



Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen untuk indikator demografi. Variabel indikator demografi yang digunakan adalah total fertility rate. Perolehan data TFR didapat dari dataset PBB terkait TFR negara-negara di dunia. PBB melalui UNDP dalam laporannya world population prospect (2006) merilis indikator demografi negaranegara di dunia termasuk TFR di dalamnya. Oleh karenanya variabel independen dalam penelitian ini menggunakan dataset TFR negara-negara di dunia era demokrasi gelombang ke empat.

Indikator Fertilitas

Selain dibutuhkan indikator variabel demokrasi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka berikutnya dibutuhkan indikator fertilitas sebgai variabel independen yang akan diuji bersama variabel demokrasi. Tingkat fertilitas sendiri menggambarkan tingkat kesuburan seorang wanita selama masa suburnya (15–49 tahun). Tingkat fertilitas merupakan sebuah variabel demografi yang sangat penting karena perubahannya sangat mempengaruhi komposisi demografi dalam suatu negara (Lenka & David S. Siroky 2005).

Dalam penelitain ini indikator demografi yang dimaksud adalah *total fertility rate (TFR)*. Pemilihan TFR ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana korelasi antara tingkat demokrasi dalam suatu negara dengan kebiasaan melahirkan (*fertility behaviour*) dalam suatu negara sebagai faktor eksogen demokrasi.

Pengukuran *fertility behaviour* dapat dilakukan dengan cara pengukuran fertilitas kumulatif. Pada pengukuran fertilitas kumulatif dilakukan pengukuran terhadap jumlah anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada saat perempuan tersebut memasuki usia subur hingga batas reproduksinya yakni rentang usia 15–49 tahun (Mantra 2007: 158).

Metode pengukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur fertilitas kumulatif adalah *total* fertility rate (TFR). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya; serta tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu (Mantra 2007: 158).

Perolehan TFR sendiri dapat dijelaskan pada persamaan (1.2).

TFR =
$$5 \Sigma i ASFRi$$
.....(1.2)

di mana:

TFR = total fertility rate

i = kelompok umur 5 tahunan, dimulai dari

15–19 tahun

ASFRi = tingkat fertilitas menurut umur ke-I dari

kelompok berjenjang 5 tahunan

Klasifikasi Tingkat Ekonomi Sebagai Variabel Kontrol

Pengujian pengaruh variabel independen dalam hal ini *total fertility rate* (TFR) terhadap variabel dependen yakni tingkat demokrasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap jumlah sampel yang besar. Sampel penelitian yang meliputi 141 negara di dunia tentu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat general. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu digunakan variabel lain sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah memang variabel independen benar-benar memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen. Kerangka teoritis tingkat fertilitas, demokrasi variabel tingkat fertilitas penduduk, dan tingkat demokrasi ternyata juga berkaitan dengan variabel lain yakni variabel tingkat perekonomian sebuah negara. Oleh karena itu variabel tingkat ekonomi suatu negara digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Seymour Martin Lipset (1959) dalam salah satu studinya terkait syarat-syarat kondisi sosial yang diperlukan bagi demokrasi menjelaskan bahwa tingkat perekonomian sebuah negara sangat memengaruhi tingkat demokrasi negara tersebut. Penelitian Lipset tersebut mengungkap bahwa tingkat pendapatan per kapita sebuah negara berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi bagi suatu negara. Di sisi lain berdasrakan model transisi demografi yang dikembangkan oleh Notestein dkk. (1944) serta penelitian Cowgil (1963) mengungkap bahwa terdapat kaitan erat antara kondisi perekonomian sebuah negara degan tingkat demografi negara tersebut. Berdasarakan penelitian Lipset dan juga teori transisi demografi tersebut maka tingkat pendapatan sebuah negara digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengklasifikasikan negara sampel menjadi tiga kelompok besar, yakni: negara dengan tingkat pendapatan tinggi (high income), menengah (midle income), serta tingkat pendapatan rendah (low income). Pengkalsifikasian negara sampel ke dalam tiga kelompok tersebut diharapkan dapat menghilangkan bias serta mengetahui secar lebih spesifik terkait pola pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat demokrasi.

Uji Statistik TFR dengan Demokrasi

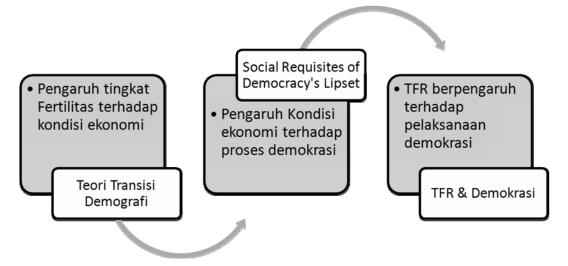
Setelah dijabarkan terkait kerangka kerja teoritis, serta indikator dan konsep yang digunakan maka diperlukan sebuah pengujian empiris untuk menghasilkan sebuah generalisasi deskriptif pengaruh kausalitas tingkat fertilitas dengan tingkat demokrasi. Pengujian empiris yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Pengujian statistik ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran kajian teoritis yang dihasilkan di atas. Dengan kata lain analisis statistik yang perlu dilakukan adalah analisis statistik yang mampu menguji korelasi dan hubungan antara variabel tingkat fertilitas dan tingkat demokrasi.

Pengujian terkait korelasi antara dua variabel dalam ilmu statistik dapat dilakukan dengan analisis bivariat menggunakan model *pearson correlation* (Silalahi 2006: 343). Sedangkan analisis yang mampu menjelaskan ada tidaknya hubungan antara dua variabel dapat digunakan analisis regresi (Santoso 2008: 274).

Berikut ini dijabarkan sejumlah pengujian statisitik terkait untuk menjelaskan pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat demokrasi. Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan analisis bivarian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui derajat keeratan dan arah hubungan antara tingkat fertilitas dengan tingkat demokrasi. Berdasarkan sampel dan indikator yang digunakan maka data bersifat parametrik oleh karenanya pengujian yang digunakan adalah *pearson correlation*.

Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Pengujian ini menempatkan indikator ke dalam variabel dependen dan independen sehingga dapat diketahui pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi.

Dalam pengujian berikut setiap pengujian statistik dilakukan sebanyak empat kali. Pertama, dilakukan pengujian statistik untuk mengetahui bentuk hubungan tingkat fertilitas penduduk dengan tingkat demokrasi secara umum. Kedua, untuk menghindari bias data dari jumlah sampel negara yang cukup besar yakni mencapai 141 negara maka dilakukan pengujian dengan memperhatikan variabel kontrol. Oleh karena itu pengujian kedua dilkukan pengujian statistik untuk mengetahui bentuk hubungan tingkat fertilitas total penduduk dengan tingkat demokrasi terhadap negara-negara berpendapatan tinggi (high income). Ketiga, pengujian serupa dilakukan terhadap negara dengan tingkat pendapatan menengah (midle income). Keempat, pengujian terakhir dilakukan terhadap negara dengan tingkat pendapatan rendah (low income).



Bagan 3.Pengaruh Tingkat Fertilitas terhadap Tingkat Demokrasi

Hasil Penelitian

Demografi dan Demokrasi

Penjelasan teoritis terkait pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi hingga saat ini memang sulit ditemukan. Namun sejumlah kajian demografi dan kajian demokrasi dapat digunakan sebagai penghubung teoritis terkait demografi dan demokrasi. Berikut ini dijelaskan kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk membangun kerangka penjelas pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat demokrasi.

Pertama, transisi demografi yang ditandai dengan turunnya tingkat fertilitas sebuah negara berkorelasi dengan meningkatnya tingkat pendapatan perkapita sebuah negara (Notestein dkk., 1944). Dengan kata lain telah terbangun sebuah jembatan teoritis yang menghubungkan tingkat fertilitas dengan tingkat kesejahteraan. Semakin rendahnya tingkat fertilitas sebuah negara maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Implikasinya negara ini memiliki tingkat GNI yang lebih tinggi.

Kedua, berdasarkan tesis Lipset (1959) didapati bahwa semakin tinggi tingkat GNI per kapita sebuah negara maka semakin tinggi tingkat demokrasi negara tesebut (Lipset 1959). Tesis Lipset sendiri merupakan penghubungan tingkat kesejahteraan dengan tingkat demokrasi. Negara yang memiliki tingkat GNI perkapita tinggi memiliki tingkat demokrasi yang lebih baik.

Penggabungan teori transisi demografi (Notestein dkk 1944) dan tesis Lipset (1959) memberikan sebuah bangunan teoritis yang mampu menjelaskan pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi. Pada bagan 2 dapat dilihat bagaimana penggabungan teori mulai dari transisi demografi hingga tesis Lipset yang kemudian menjelaskan pengaruh tingkat fertilitas terhadap demokrasi.

Kerangka kerja teoritik di atas menjelaskan hubungan kausalitas antara tingkat fertilitas total penduduk sebuah negara dengan tingkat demokrasi negara tersebut. Setelah dibangun sebuah kerangka kerja teoritik di atas maka berikutnya perlu sebuah kerangka metode untuk meneliti pengaruh kausalitas

tingkat fertilitas terhadap tingkat demokrasi. Hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan penelitian empiris terdapat sebuah kerangka acuan yang jelas terkait konsep fertilitas dan demokrasi yang dimaksud. Dalam kerangka ini mencakup konsep, variabel dan indikator dari fertilitas dan demokrasi yang digunakan.

Korelasi Tingkat Fertilitas Total (TFR) dengan Tingkat Demokrasi

Hasil pengujian analisisi statisitik menggunakan model *pearson correlation* menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat fertilitas penduduk dengan tingkat demokrasi. Korelasi tingkat fertilitas penduduk terhadap tingkat demokrasi ditemukan baik ketika variabel dependen yakni tingkat demokrasi menggunakan *vanhanen index* sebagai indikator maupun *freedom house index*.

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui hasil uji statisitik dengan model *pearson correlation* antara *total fertility rate* (TFR) dengan *vanhanen index* (ID) didapatkan koefisien korelasi sebebsar –0,670. Sedangkan hasil pengujian *pearson correlation* antara TFR dengan indikator demokrasi *freedom house indehx* (FHID) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,391.

Koefisien korelasi di atas menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat fertilitas dengan indikator demokrasi prosedural (ID) memiliki bentuk hubungan yang arahnya negatif atau berbanding terbalik. Artinya ketika negara dengan TFR tinggi cenderung memiliki tingkat ID yang rendah. Sedangkan untuk kasus TFR dan FHID menghasilkan koefisien yang berbanding lurus. Hal ini dikarenakan skor FHID berbeda dengan ID. Artinya jika pada ID semakin tinggi skor berarti semakin demokratis Negara tersebut, sebaliknya dalam FHID semakin tinggi skor semakin tidak demokratis negara tersebut. Berdasarkan uji korelasi di atas maka sebenanrnya menunjukkan bahwa hubungan TFR dengan tingkat demokrasi baik menggunakan FHID maupun ID sama-sama menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik.

Table 1. Hasil uji Korelasi TFR dengan Tingkat Demokrasi

Variabel	Seluruh Negara (141 Negara)	Negara Berpenghasilan Tinggi	Negara Berpenghasilan Menengah	Negara Berpenghasilan Rendah
TFR&ID	670**	342**	554**	486**
TFR&FHID	.391**	.386**	.051**	.199**

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Pengujian korelasi antara TFR dengan tingkat demokrasi menggunakan model analisisi *pearson correlation* di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol dalam penelitian ini yakni tingkat pendapatan dalam sebuah negara cenderung berperan sebagai variabel pengganggu (*distorter variable*). Hal ini disebabkan karena derajat korelasi baik yang ditunjukkan melalui koefisien korelasi pada hasil analisis awal lebih besar ketimbang derajat korelasi setelah dimasukan variabel kontrol. Bahkan pada kasus negara berpenghasilan tinggi dan menengah ditemukan tidak adanya korelasi antara TFR dengan salah satu indikator demokrasi yakni FHID sebagai variabel demokrasi subtantif dalam demokrasi poliarki.

Dengan kata lain penggunaan variabel kontrol untuk tingkat pendapatan sebuah negara pada uji korelasi antara TFR dengan tingkat demokrasi menunjukkan bahwa telah terdapat hubungan korelasi antara TFR dengan tingkat demokrasi baik substantif maupun prosedural. Artinya korelasi anatara TFR dengan tingkat demokrasi dapat dikatakan terjadi secara langsung tanpa adanya variabel perantara. Hal ini disebabkan karena derajat korelasi TFR dengan tingkat demokrasi pada saat analisis awal lebih besar ketimbang derajat korelasi setelah dimasukan variabel kontrol.

Namun hasil pengujian menggunakan variabel kontrol menemukan sejumlah temuan unik. Pertama, pada kasus negara berpenghasilan tinggi dan menengah korelasi TFR dengan tingkat demokrasi hanya berlaku untuk demokrasi prosedural (ID). Artinya pada sejumlah kasus negara berpenghasilan tinggi dan menengah TFR tidak terlalu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat demokrasi subtantif. Kedua, pada kasus negara berpenghasilan rendah TFR berpengaruh baik terhadap tingkat demokrasi subtantif maupun prosedural. Ketiga, arah korelasi anatara TFR dengan demokrasi menunjukkan arah yang berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat fertilitas sebuah negara cenderung negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang rendah.

Setelah dilakukan pengujian statistik analisis bivariat sehingga didapatkan derajat keeratan dan

-4.516

arah korelasi antara tingkat fertilitas penduduk dengan tingkat demokrasi berikutnya perlu dilakukan analisis regresi sehingg diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Analisi regresi perlu dilakukan yang memberikan gambaran terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Algifari 2000:3). Melalui analisis regresi ini maka akan didapatkan hasil yang lebih memperkuat hasil uji statistik yang telah dilakukan.

Analisis Regresi TFR Penduduk dengan Tingkat Demokrasi

Pengujian menggunakan analisis regresi memberikan hasil bahwa memang terdapat bentuk kausalitas antara TFR dengan demokrasi. Pengujian pertama dilakukan secara general antara TFR dengan tingkat demokrasi. Seperti halnya pengujian korelasi pengujian pertama dalam analisis regresi dilakukan sebagai analisis awal tanpa mengikut sertakan variabel kontrol. Berikutnya dilakukan pengujian dengan memperhatikan variabel kontrol yakni tingkat pendapatan sebuah negara.

Pengujian pertama dilakukan dengan menguji indeks demokrasi vanhanen (ID) sebagai variabel tergantung (dependen) terhadap TFR sebagai variabel bebas (independen). Dengan kata lain pengujian ini hendak mengetahui pengaruh TFR terhadap pelaksanaan demokrasi prosedural (ID) pada negara sampel. Pengujian analisisi regresi linier pertama dilakukan dengan menguji pengaruh tingkat fertilitas total penduduk terhadap tingkat demokrasi dengan menggunakana data sampel seluruh negara di dunia tanpa memperhatikan keberadaan variabel kontrol.

Hasil pengujian regresi antara TFR dengan ID Vanhanen menunjukkan bahwa memang TFR berpengaruh terhadap tingkat ID suatu negara. Dari hasil output pengujian regresi tersebut dapat dilakukan uji t. Uji t sendiri dilakukan untuk memastikan signifikansi konstanta dan variabel dependen (Santosa 2008: 282). Dari pengujian regresi antara TFR dengan ID didapat t hitung sebesar (30.769). Angka t hitung ini jauh lebih besar

-30.769

.000

Tabel 2. Hasil Uji Regresi antara TFR dengan ID

o considera						
Model	Unstandardi	Unstandardized Coefficients				
	В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	
(Constant)	31 885	464		68 739	000	

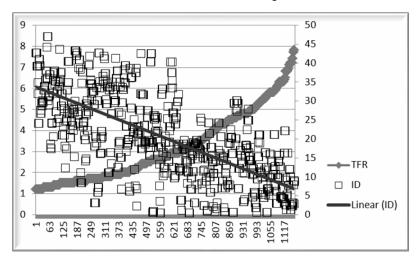
.147

-.670

Tfr

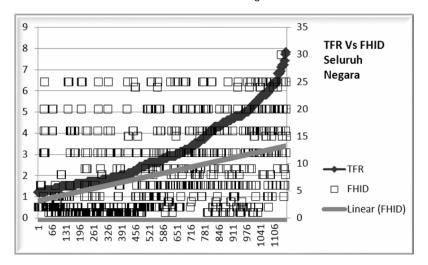
Coefficientsa

a. Dependent Variable: id



Grafik 2.Grafik Linier sederhana TFR dengan ID

Grafik 3.Grafik sederhana TFR dengan FHID



ketimbang t tabel (1,646). Sehingga koefisien regresi yang dihasilkan melalui analisis regresi tersebut dapat dikatakan signifikan.

Konstanta dari hasil analsisi regresi memiliki tingkat signifikansi 0,000. Jumlah ini jauh lebih kecil dari *significance level* 0,05. **Sehingga konstanta** hasil regresi signifikan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan terdapat hubungan antara TFR dengan ID. Hasil anilisis menggunakan regresi didapati persamaan linier antara ID dan TFR seperti pada persamaan (1.3)

$$y = 31,885 - 4,516 x$$
 (1.3)

di mana:

y = indeks demokrasi vanhanen

x = TFR

Selain pengujian kausalitas TFR dengan indeks demokrasi Vanhanen sebagai standar demokrasi prosedural maka pengujian awal juga dilakukan antara TFR degnan indeks demokrasi subtantif, dalam hal ini pengujian regresi dilakukan terhadap freedom house index (FHID) sebagai variabel dependen dan TFR sebagai variabel independen.

Hasil pengujian antara TFR dengan FHID juga menunjukkan terdapat hubungan antara TFR dengan pelaksanaan demokrasi subtantif. Dari uji ANOVA atau F *test* didapat F hitung adalah 37,048 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi (0,000) jauh lebih kecil dari *significance level* 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara TFR dengan FHID. Hasil persamaan regresi yang diperoleh dari uji regresi adalah persamaan linear antara TFR dengan FHID seperti pada persamaan (1.4).

$$y = 3,489 + 1,760 x$$
.....(1.4)

di mana:

y = indeks demokrasi freedom house x = TFR

Maksud dari persamaan (1.3) di atas adalah semakin besar nilai x (TFR) maka semain kecil nilai y (indeks demokrasi vanhanen). Artinya persamaan regresi yang dibangun menunjukkan

bentuk korelasi yang dibangun menunjukkan bentuk korelasi yang serupa dengan hasil pengujian statisitik sebelumnya menggunakan model *pearson correlation*. TFR berbanding terbalik dengan tingkat demokrasi prsedural.

Sedangkan pada persamaan (1.4) menjelaskan ketika terjadi kenaikan nilai x (TFR) maka terjadi peningkatan y (freedom house index). Artinya ketika terjadi peningkatan FHID maka negara tersebut mengalami penurunan tingkat demokrasi menjadi lebih tidak demokratis. Hal ini juga sesuai dengan hasil uji korelasi sebelumnya. Dengan kata lain melalui uji awal pada persamaan regresi ini maka didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat fertilitas total penduduk sebuah negara maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat demokrasi yang rendah.

Dari grafik 2 di bawah tampak bahwa TFR berkorelasi negatif dengan ID sedangkan dengan FHID berkorelasi positif. Korelasi positif TFR dengan FHID sebenanrya menunjukkan bahwa TFR berkorelasi negatif dengan tingkat demokrasi subtantif.

Grafik 2 di bawah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat fertilitas total penduduk sebuah negara maka semakin rendah tingkat demokrasi prosedural negara tersebut. Hal ini berkesesuaian dengan persamaan regresi yang dihasilkan dari uji regresi linier sebelumnya.

Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi TFR sebuah negara maka semakin tinggi pula skor FHID negara tersebut. Perolehan Skor FHID yang semakin tinggi menunjukkan semakin rendah tingkat demokrasi subtantif negara tersebut. Maka bentuk korelasi antara TFR dengan FHID sebenarnya menunjukkan bentuk korelasi yang berbanding terbalik.

Berdasarkan pengujian regresi maka didapatkan kesimpulan bahwa secara umum semakin tinggi tingkat fertilitas total penduduk sebuah negara maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin rendah tingkat demokrasi negara tersebut baik dalam tataran demokrasi prosedural (ID) maupun demokrasi subtantif (FHID). Dengan kata lain terdapat korelasi asosiatif antara TFR dengan tingkat demokrasi.

Uji Regresi antara TFR dengan Tingkat Demokrasi pada Kasus Negara-negara Berpenghasilan Tinggi, Menengah dan Rendah

Seperti halnya dalam pengujian korelasi analisis bivariat yang telah dijabarkan sebelumnya berikut ini dijabarkan hasil uji regresi dengan menggunakan variabel kontrol. Berikut ini dilakukan analisis regresi dengan mengkluster negara sampel ke dalam tiga variabel tingkat pendapatan, yakni berpendapatan tinggi, menengah dan rendah. Penggunaan variabel kontrol ini dilakukan untuk membuktikan bahwa bentuk korelasi asosiatif benar-benar terjadi antara TFR dengan tingkat demokrasi bukan dikarenakan adanya variabel lain yang dalam hal ini variabel tingkat pendapatan dalam sebuah negara.

Pengujian analisis regresi pada negara-negara dengan tingkat penghasilan tinggi menengah dan rendah didapatkan bahwa bentuk regresi yang dihasilkan cenderung memiliki koefisien determinasi yang lebih rendah daripada kefesien determinasi sebelum dimasukkan variabel kontrol.

Dari tabel 2 didapatkan besar koefisien determinasi persamaan regresi berturut-turut sebesar 0,117 untuk negara berpenghasilan tinggi, 0,307 untuk negara dengan penghasilan menengah serta 0,236 untuk negara dengan tingkat penghasilan rendah. Besar koefisien determinasi ini didapatkan dari besar R *square* pada tabel Model Summary hasil analisis regresi.

Nilai koefisien determinasi antara TFR dengan ID ketika telah dimasukkan variabel kontrol lebih kecil ketimbang koefisien determinasi hasil regresi pada analisis awal (0,449) sebelum dimasukkan variabel kontrol tingkat pendapatan dalam sebuah negara. Artinya keberadaan tingkat pendapatan negara sebagai sebuah variabel kontrol berperan sebagai variabel pengganggu. Dengan kata lain pengujian analisisi awal regresi antara TFR sebagai variabel bebas dan ID sebagai variabel terikat tanpa memperhatikan variabel kontrol lebih tepat untuk menjelaskan bentuk korelasi asosiatif. Artinya memang terdapat korelasi asosiatif antara tingkat fertilitas total penduduk dengan tingkat demokrasi.

Pengujian regresi antara TFR dengan tingkat demokrasi dengan memperhatikan variabel kontrol juga dilakukan pada variabel demokrasi subtantif. Hasil pengujian regresi antara TFR dengan FHID sebagai indikator demokrasi subtantif ternyata juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda ketika dilakukan pengujian antar TFR dengan ID. Keberadaan variabel kontrol tingkat pendapatan

justru berperan sebagai variabel pengganggu. Artinya persamaan regresi pada analisis awal terkait hubungan TFR dengan FHID lebih tepat digunakan dan menjelaskan bahwa terdapat korelasi asosiatif antara TFR dengan tingkat demokrasi subtantif. Pada tabel 2 dapat dijumpai perbandingan koefisien determinasi hasil analisis regresi antara TFR dan FHID pada analisis awal, negara-negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah.

Tabel 2.
Perbandingan koefisien determinasi dari analisis regresi antara
TFR dengan FHID seblum dan sesudah dimasukan variabel
kontrol

No.	Analisis Regresi Kasus	Koefisien Determinasi
1	Analisis Awal	0,153
2	Negara berpenghasilan tinggi	0,007
3	Negara berpenghasilan menengah	0,003
4	Negara berpenghasilan rendah	0,040

Dari uji regresi di atas mulai dari hubungan antara TFR dengan ID hingga hubungan TFR dengan FHID dapat disimpulkan dua hal, yakni: [1] terdapat korelasi negatif atau berbanding terbalik antara TFR dengan demokrasi; [2] tingkat TFR memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Sehingga pengujian statistik di atas telah memberikan sebuah generalisasi bentuk hubungan antara TFR dengan demokrasi.

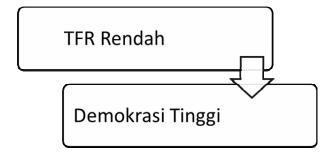
Fertilitas Rendah sebagai Syarat Demografis Kondisi Demokratis

Pembahasan seputar korelasi TFR terhadap demokrasi hingga kasus sejumlah negara yang diangkat dalam tulisan ini memberikan gambaran bagaimana kondisi demografis tertentu memberikan efek terhadap kondisi politik yang ada dalam negara tersebut. Hasil pengujian statistik hingga tinjauan terhadap kondisi sejumlah negara mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas yang rendah menjadi salah satu faktor eksogen penunjang pelaksanaan demokrasi. Dari sejumlah pengujian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin rendah tingkat fertilitas sebuah negara semakin besar peluang negara tersebut menerapkan demokrasi baik secara prosedural maupun subtantif.

Generalisasi deskriptif di atas dapat menjadi pijakan penting untuk memprediksi pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara dengan melihat faktor-faktor demografis dalam hal ini tingkat fertilitas. Pengujian statistik yang dilakukan dalam penelitian ini semakin memperkuat kajian teoritis yang dilakukan sebelumnya.

Oleh karenanya tulisan ini telah memberikan sebuah penjelasan bahwa tingkat fertilitas suatu negara memiliki pengaruh penting terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tersebut. Negara yang memiliki tingkat fertilitas rendah cenderung memiliki tingkat demokrasi yang rendah baik secara prosedural maupun subtantif.

Bagan 3.
Bentuk Hubungan kausal tingkat fertilitas total penduduk dengan tingkat demokrasi



Simpulan

Sejumlah pembahasan di atas mulai dari analisis data statistik hingga analisis sejumlah contoh negara sampel telah menjawab pertanyaan utama dalam tulisan ini, yakni sejauh mana bentuk pengaruh faktor demografi dalam hal ini tingkat fertilitas terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Sejumlah kesimpulan dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Pertama, faktor demografi dalam hal ini TFR memiliki bentuk korelasi dengan demokrasi. Korelasi yang terjadi antara TFR dengan demokrasi adalah korelasi negatif atau berbanding terbalik. Tidak hanya itu teryata TFR juga mampu menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan demokrasi suatu negara. Dengan kata lain TFR juga memiliki hubungan kausalitas dengan tingkat demokrasi. Dengan kata lain semakin tinggi TFR sebuah negara maka cenderung negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang lebih rendah ketimbang negara dengan TFR yang lebih rendah.

Kedua, variabel tingkat pendpatan negara yang difungsikan sebagai variabel kontrol dalam tulisan ini ternyata justru berperan sebagai variabel pengganggu dalam kaitan hubungan kausalitas antara tingkat fertilitas dengan tingkat demokrasi. Oleh karena itu terdapat hubungan yang nyata antara variabel tingkat fertilitas penduduk dengan variabel tingkat demokrasi. Dapat disimpulkan bahwa negara dengan TFR yang rendah cenderung lebih demokratis ketimbang negara dengan TFR yang tinggi.

Hasil temuan ini menarik digunakan sebagai pijakan untuk membaca fenomena internasional yang

ada. Hal ini disebabkan fenomena global menurunnya tingkat fertilitas dunia dan persebaran demokrasi. Oleh karenanya penelitian ini dapat digunakan sebagai prediksi di mana lagi kemungkinan besar demokrasi akan muncul, dan di mana kemungkinan demokrasi akan tumbuh atau bahkan hancur. Selain itu fenomena pengadopsian demokrasi yang kini hampir diterapkan di seluruh dunia nampaknya perlu memperhatikan prakondisi-prakondisi penerapan demokrasi yang stabil. Penelitian ini mengungkap tingkat fertilitas total penduduk sebagai salah satu prakondisi demokrasi.

Pemaksaan penerapan demokrasi baik oleh aktor dalam negeri maupun luar negeri dalam sebuah tatanan masyarakat yang belum memiliki prakondisi demokrasi perlu ditinjau kembali karena cenderung menghasilkan demokrasi yang tidak stabil serta pelaksanaan demokrasi yang rendah. Implikasinya justru kekacauan yang terjadi dalam negara tersebut. Imperialisme demokrasi di Iraq hingga apa yang terjadi di Indonesia misalnya dapat menjadi sebuah contoh di mana demokratisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Indonesia diterapkannya demokrasi yang tercermin pada berbagai pemilihan umum yang digelar baik di tingkat nasional maupun daerah tidak jarang menimbulkan konflik horisontal. Hal ini bisa jadi disebabkan Indonesia belum memenuhi prokondisi demokrasi. Hingga saat ini Indonesia dan Iraq termasuk negara dengan TFR yang tinggi, yakni 2,4 untuk Indonesia dan 4,9 untuk Iraq. Sehingga kompatibilitas Indonesia dan Iraq dengan demokrasi masih perlu ditinjau kembali.

Sudah saatnya pemerhatian faktor demografi perlu di tingkatkan oleh akademisi ilmu politik dan juga HI. Demografi semestinya menjadi salah satu kajian penting dalam disiplin ilmu HI dan Politik. Proses demokratisasi di Iraq yang ternyata justru menimbulkan sejumlah permasalahan besar tidak lepas dari minimnya kajian demografi terkait krisis Iraq. Oleh karenanya ke depan kajian seputar demografi seharusnya mendapat porsi lebih bagi kalangan akademisi politik utamanya ilmuan HI.

Terakhir penelitian ini memberikan sebuah gambaran baru dalam studi demografi dan demokrasi. Hasil utama penelitian ini membuktikan bahwa negara dengan tingkat fertilitas yang rendah cenderung memiliki tingkat demokrasi yang lebih baik. Oleh karenanya pemerhatian faktor demografi sudah saatnya menjadi suatu hal yang penting dalam kaijan ilmu Hubungan Internasional.

Daftar Pustaka

- Algifari (2000). Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi. Yogyakarta: BPFE.
- Dahl, RA (2001). Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Notestein, FW (1944). The Future Population of Europe and the Soviet Union: Population Projections, 1940–1970. Geneva: League of Nations.
- Mantra, IB (2007) Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Przeworski, A (2000) Democracy and Development. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santoso, S (2008) Panduan lengkap menguasai SPSS 16. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Silalahi, U (2006). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.
- Sorensen, G (2003). Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNDP (2008). Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World. New York: Palgrave Mac-millan.
- Vanhanen, T (ed) (1992). Democratization Index in the Polity Dataset. Strategies of Democratization. Washington DC: Crane Russak.
- Acemoglu D & Johsnon S (2005). Income and Democracy. National Bureau of Economic Research Working Papers 11205.
- Barro RJ (1994). Democracy and Growth. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 4909.
- Huntington, SP (1991) Democracy's third wave. Journal of Democracy 2(2): 12–34.
- Lipset, SM (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. The American Political Science Review 53(1): 69–105.
- Lipset, SM (1994). The social requisites of democracy revisited: 1993 Presidential Address. American Sociological Review 59(1): 1–22.
- Thompson, WS (1929). Population. American Journal of Sociology 34 (6): 959–975.
- Vanhanen, T (2000). A new dataset for measuring democracy, 1810–1998. Journal of Peace Research 37(2): 251–265.
- Freedom in the World (2008). [Diakses 29 Maret 2008]. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15.
- Freedom in the World2007 Subscores (2008) [Diakses 29 Maret 2008]. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=5.
- Vanhanen, T (t.t) Vanhanen's index of democracy. The Polyarchy dataset. [Diakses 29 Maret 2008]. http://www.prio.no/page/Project_detail//9244/42504. html?